

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2024

LKIP



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER



BAPENDA
JEMBER

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Laporan ini disusun berdasarkan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain sebagai wujud akuntabilitas, laporan ini juga bertujuan sebagai alat evaluasi kinerja untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian kinerja tahun ini, baik dari unsur pemerintah daerah, masyarakat, serta para wajib pajak yang turut berperan dalam optimalisasi pendapatan asli daerah. Kami berharap laporan ini dapat menjadi referensi dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih baik di masa mendatang.

Jember, 25 Februari 2025

**Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**



HARRY ASUSTRIONO, ATD, MT

Pembina Utama Muda

NIP. 19690811 199203 1 005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	2
C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH	2
D. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENDAPATAN DAERAH	5
E. SARANA DAN PRASARANA BADAN PENDAPATAN DAERAH	6
F. ANGGARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH	8
G. ISU STRATEGIS	10
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	12
A. RENCANA STRATEGIS	12
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	15
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024	19
D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	21
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024.....	21
B. CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH	22
C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN	28
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA.....	39
E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN	40
F. REALISASI ANGGARAN	44
BAB IV PENUTUP	48
LAMPIRAN	52

Lampiran 1.	Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Lampiran 2.	Matriks Renstra (Tabel T-C.27)
Lampiran 3.	RKT 2024
Lampiran 4.	Perjanjian Kinerja Perubahan 2024
Lampiran 5.	Indikator Kinerja Utama (IKU) 2024

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan. Secara umum, kinerja Badan Pendapatan Daerah menunjukkan perkembangan yang baik dengan capaian indikator kinerja utama yang mayoritas memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2024.

Sementara itu, masih terdapat satu indikator yang belum mencapai target optimal, yakni terkait penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (I-ETPD). Beberapa tantangan yang mempengaruhi hal ini antara lain masih adanya wilayah blankspot yang menghambat akses digitalisasi transaksi serta tingkat adopsi sistem pembayaran elektronik yang perlu ditingkatkan di kalangan masyarakat.

Namun demikian, masih terdapat satu indikator yang belum mencapai target optimal, terutama terkait penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (I-ETPD). Beberapa faktor yang mempengaruhi hal ini antara lain ketersediaan infrastruktur digital di beberapa wilayah blankspot serta tingkat adopsi masyarakat terhadap sistem pembayaran digital.

Dari sisi anggaran, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2024 didukung dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.718.698.409,00, yang terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 32.235.382.209,00 dengan tingkat realisasi 78,30%, serta Belanja Modal sebesar Rp. 6.483.316.200,00 dengan realisasi 25,25%.

Ke depan, Badan Pendapatan Daerah akan terus memperkuat strategi digitalisasi pajak, meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat terkait sistem pembayaran elektronik, serta mengoptimalkan pemantauan berbasis data analitik. Langkah-langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak daerah serta mempercepat pencapaian target kinerja yang lebih optimal dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jember.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya Good Governance merupakan persyaratan bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Upaya pembangunan tersebut sejalan dengan TAP MPR RI. No. XI / MPR / 1998 tentang penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme disebutkan salah satu asas tertib penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi antara lain sebagai alat penilaian kinerja, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi dan wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit di Lingkungan Perangkat Daerah.

Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2024

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dimaksudkan untuk menyampaikan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan

Tujuan penyusunan Laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah :

- Sebagai sarana pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder atas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang pengelolaan sumber daya yang menjadi kewenangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- Sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam rangka meningkatkan kinerja Badan Pendapatan Daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih baik

C. KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Kedudukan, tugas, fungsi dan susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

- (1) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan.
- (2) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan;
- (4) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
 - b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - e. pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - f. pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
 - g. penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
 - h. pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
 - i. pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
 - j. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
 - k. perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja Badan di bidang pendapatan daerah;
 - l. penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
 - m. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
 - n. penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
 - o. pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;
 - p. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
 - q. pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
 - r. pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
 - s. penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup Badan;
 - t. penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup Badan;
 - u. pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
 - v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- (5) Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari :

- a. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri atas :
 - a) Kepala Badan;
 - b) Sekretariat, membawahi :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - c) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pendataan dan Pelayanan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - d) Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Keberatan dan Pengurangan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - e) Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Penagihan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - f) Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Verifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah; dan
 - 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - g) UPTD; dan
 - h) Kelompok Jabatan Fungsional.
- b. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- c. Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- d. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah

dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

- e. Sub Bidang dipimpin oleh Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

D. SUMBER DAYA MANUSIA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terdiri dari 102 (seratus dua) orang ASN, dan 31 (tiga puluh satu) orang Non ASN. Berikut merupakan rincian sumber daya manusia pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember :

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi. Berdasarkan hasil analisa jabatan kebutuhan pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang dituangkan pada Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/239/1.12/2024 tentang Peta Jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Jumlah personil Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang ada per 31 Desember 2024 berdasarkan keterisian pegawai yang datanya sudah diupdate melalui SIMPEG sebanyak 125 orang, sedangkan berdasarkan hasil analisa jabatan dan analisa beban kerja idealnya sebanyak 153 orang, sehingga masih terdapat kekurangan pegawai sebanyak 28 orang atau 18,30%. Namun demikian, sementara ini kekurangan pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember bisa diatasi dengan adanya Non ASN sejumlah 30 orang.

Komposisi pegawai keseluruhan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

Jabatan	Kebutuhan					Bezetting / Pegawai yang Ada						L	P
	Σ	SMA	D3	S1	S2	Σ	SMP	SMA	D3	S1	S2		
Jabatan Pimpinan Tinggi	1				1								1
Jabatan Administrasi													
1. Administrator	8			6	2	5				3	2	3	2
2. Pengawas	15		1	14		13			1	12		5	8
3. Pelaksana	126	88	25	13		75	14	50	9	2		56	19
Jabatan Fungsional	3			3		2				2		1	1
Non ASN						30		16	7	7		19	11
Jumlah	153	88	26	36	3	125	14	66	17	26	2	84	41

Sumber Data : Data Kepegawaian Badan Pendapatan Daerah 2024

Berdasarkan tabel 1.4, menunjukkan adanya gap antara kebutuhan pegawai dari hasil analisis jabatan dengan bezetting pegawai. Jumlah pegawai 125 orang **belum memenuhi** jumlah ideal untuk pengelolaan beban kerja di Badan Pendapatan Daerah.

Adapun jabatan yang dibutuhkan adalah jabatan pelaksana, dengan rincian sebagai berikut :

1. Penyusun Bahan Pengembangan Regulasi
2. Analis Pajak dan Retribusi Daerah
3. Pengelola Data dan Informasi Perpajakan
4. Pengelola Data Potensi Pajak
5. Pengelola Data Kebijakan Pajak
6. Pengelola Data Administrasi dan Verifikasi

E. SARANA PRASARANA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi selain penguatan pada sumber daya manusia, juga diperlukan dukungan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai akan menunjang keberhasilan ketercapaian tugas pokok dan fungsi Institusi. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember menempati gedung di Jl. Jawa Nomor 72 Kabupaten Jember

Sebagai penunjang penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang semakin meningkat, maka gedung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember cukup memadai, karena sudah tersedianya ruang pelayanan

untuk wajib pajak daerah. Adapun data sarana dan prasarana pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut :

Tabel 1.2
Profil Sarana dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Per 31 Desember 2024

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
1.	Tanah	5.533 m ²	baik	5.533 m ²
2.	P.C Unit	140	baik	140
3.	Gedung Dan Bangunan	34	baik	34
4.	Mesin absensi	9	baik	9
5.	Sound System	8	baik	8
6.	Televisi videowall	16	baik	16
7.	Televisi	14	baik	14
8.	A.C.	34	Baik	34
9.	Filing Cabinet Besi	44	Kurang Baik	44
10.	Handy Cam	1	Kurang Baik	1
11.	Lemari Arsip	41	10 Kurang Baik	41
12.	Stationary Water Pump	2	Kurang Baik	2
13.	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	Baik	1
14.	Mesin Pemotong Rumput	4	Kurang Baik	4
15.	Monitor/Display	16	14 Kurang Baik	16
16.	Wireless	1	Kurang Baik	1
17.	Alat pemadam kebakaran (apar)	1	Baik	1
18.	Kursi Kerja	116	26 Kurang Baik	6
19.	Meja Kerja	102	40 Kurang Baik	102
20.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	152	71 Kurang Baik	152
21.	UPS	41	7 Kurang Baik	41
22.	Server	8	4 Kurang Baik	8
23.	CCTV - Camera Control Television System	7	3 Kurang Baik	7
24.	Sepeda Motor	58	42 Kurang Baik	65
25.	Sepeda Motor Listrik	3	Baik	3
26.	Mobil	10	Baik	14

No.	Sarana Prasarana	Jumlah	Kondisi	Jumlah Ideal
27.	Rak Besi	11	Kurang Baik	11
28.	Karpet	20	Baik	20
29.	Hard Disk External	3	Baik	3
30.	Alat Penghancur Kertas	5	3 Kurang Baik	5
31.	Brankas	5	Kurang Baik	5
32.	Telephone Mobile / PABX	9	1 Kurang Baik	9
33.	Mesin Fotocopy	5	1 Kurang Baik	5
34.	Alat Ukur Indikator Server	5	Baik	5
35.	Kamera Udara (Drone)	1	Baik	1
36.	Lap top	17	7 Kurang Baik	17
37.	LCD Projector/Infocus	1	Baik	1
38.	Lemari Es	3	Baik	3
39.	Dispenser	3	Baik	3
40.	Elektrik Thermometer	1	Baik	1
41.	Internet	12	Baik	12
42.	Jam Dinding	31	Kurang Baik	31
43.	Software	19	Baik	19
44.	Aset Lain-Lain	172	Kurang Baik	172
	Jumlah	1187		

Sumber Data : Kartu Inventaris Barang Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

F. ANGGARAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember pada tahun 2024 berasal dari APBD Kabupaten Jember. Pada tahun anggaran 2024 Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember memiliki 3 (tiga) Program, 6 (enam) Kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) Sub Kegiatan yang secara total mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 38.718.698.409,00 sebagaimana tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.4
Anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
	Program penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp. 30.229.827.989.00
	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Rp. 175.941.300,00
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 175.941.300,00
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Rp. 21.781.407.689
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 19.673.565.239
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 2.107.842.450
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	Rp. 3.778.548.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 15.670.100
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 1.128.316.200
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 1.368.618.400
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 609.171.500
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 656.772.000
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 506.800.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 10.000.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 496.800.000
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3.987.130.800
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 105.291.600
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp. 931.139.200
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 172.000.000
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 2.778.700.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 160.620.000
	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 160.620.000
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Rp. 160.620.000

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 8.328.250.420
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 8.328.250.420
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Rp. 327.520.000
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemungutan Pajak Daerah	Rp. 505.002.400
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Rp. 777.525.000
	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Rp. 550.000.000
	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Rp. 265.477.500
	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	Rp. 294.518.020
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Rp. 3.046.030.000
	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Rp. 99.937.500
	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	Rp. 1.869.600.000
	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Rp. 64.000.000
	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Rp. 400.640.000
	Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Rp. 128.000.000
	JUMLAH	Rp. 38.718.698.409

Sumber Data : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

G. ISU STRATEGIS

Terdapat beberapa isu strategis yang harus diperhatikan dalam menghadapi tantangan pelaksanaan tugas pokok fungsi dan pelaksanaan program kegiatan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah, yaitu :

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi PD adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi PD di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Isu-isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal termasuk

permasalahan layanan. Adapun isu strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam melaksanakan tugas dan fungsi, yaitu:

- a. Kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban membayar pajak;
- b. Kurang optimalnya penggalian potensi pengelolaan sumber-sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- c. Kurang optimalnya pengelolaan Pendapatan Asli Daerah berbasis Sistem Informasi dan Komunikasi;

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember merupakan penjabaran operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember tahun 2021-2026. Rencana Strategis ditetapkan dengan Peraturan Bupati Jember nomor 41 tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Jember nomor 99 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember tahun 2021-2026.

Visi dan misi dalam pelaksanaan pembangunan Pemerintah Kabupaten Jember, mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025. RPJPD menegaskan bahwa arah pembangunan jangka panjang daerah menggunakan visi bersama yang menjadi etos kerja.

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. Visi Pemerintah Kabupaten Jember pada periode 2021-2026 yaitu: “Sudah waktunya membenahi Jember (Wes Wayahe Mbenahi Jember) dengan berprinsip pada sinergi, kolaborasi, dan akselerasi dalam membangun Jember.” Yang selanjutnya dijabarkan dalam 7 (tujuh) misi pembangunan, sebagai sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.

Sesuai cascading kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, Misi, tujuan dan sasaran daerah yang di dukung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yaitu :

1) Misi ke-2 :

Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara Eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya

2) Tujuan ke-1 :

Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Sinergi Dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

3) Sasaran Strategis Kabupaten ke-14 :

Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 tahun. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember yang diformulasikan dalam jangka menengah dan tahunan pada Rencana Strategis adalah sebagai berikut :

Tujuan : *"Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah"*

Indikator Tujuan : Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah yang Dikelola secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

Sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan serta tugas dan fungsi yang harus diemban dan dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember, maka sasaran yang ditetapkan sebagai landasan perencanaan / program yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

Sasaran :

1. *Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Asli Daerah*

Indikator Sasaran :

- a. Jumlah realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah;
- b. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah;

- c. Persentase pendapatan Pajak Daerah yang dipungut terhadap potensi pajak yang seharusnya dipungut; dan
 - d. Persentase realisasi Pajak Daerah terhadap target.
2. *Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah*
- Indikator Sasaran :
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah.

Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026

Tujuan : Meningkatkan Penerimaan Pajak Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator Tujuan : Persentase realisasi pajak daerah yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
SEBELUM PERUBAHAN							
Sasaran 1 : Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah untuk mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah		637.927.673.044				
	2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		21%				
	3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut		50%				
	4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target		90%				
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah		A				

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					
		2021	2022	2023	2024	2025	2026
SETELAH PERUBAHAN							
Sasaran 1 : Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah untuk mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target			90%	94%	96%	98%
	2. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah			775.826.982.000	835.750.635.000	904.935.266.000	985.308.692.000
	3. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah			23%	25%	27%	30%
	4. Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut			75%	80%	85%	90%
Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah			A	A	A	A

Sumber data : tabel 4.1 (TC. 25) dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama PD sesuai dengan tugas fungsi dan mandat (*core business*) yang diemban. Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Indikator Kinerja Utama (IKU)

SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	<p>Jumlah Realisasi Penerimaan PAD Tahun Berkenaan</p> <p>Penjelasan : Data realisasi PAD diperoleh dari data realisasi PAD Kabupaten Jember yang melaporkan melalui aplikasi Pajak Daerah Lainnya</p>	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
	2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Realisasi PAD adalah total penerimaan daerah dari pajak, retribusi, dan sumber lain dalam satu tahun anggaran.</p> <p>Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah adalah total penerimaan yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran</p>	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
	3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah Tahun Berjalan + Tagihan Pajak}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah Realisasi Pajak Daerah adalah total penerimaan dari pajak daerah yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahun anggaran. Jumlah Target Pajak Daerah Tahun Berjalan + Tagihan Pajak Daerah Tahun Berjalan adalah total proyeksi penerimaan pajak daerah dalam satu tahun anggaran ditambah dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan pada tahun yang sama.</p>	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
	4. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah Realisasi Pajak Daerah adalah total penerimaan dari pajak daerah yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahun anggaran. Jumlah Target Pajak Daerah adalah total penerimaan pajak yang ditetapkan sebagai sasaran dalam satu tahun anggaran.</p>	1. Bidang Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah 2. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah 3. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

SASARAN STRATEGIS	IKU	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	<p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Sarana dan prasarana 	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

Sumber data : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Nomor : 065/153/1.31/2024 tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Perjanjian kinerja berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja menyajikan indikator sasaran Perangkat Daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menggambarkan hasil-hasil yang utama dan kondisi yang ingin diwujudkan pada tahun berkenaan.

Sesuai PermenPANRB nomor 53 tahun 2014, perjanjian kinerja memuat IKU dan indikator lain yang relevan. Terdapat kebijakan untuk mendorong peningkatan kinerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember dengan menambahkan indikator tambahan/penghargaan nasional dan provinsi sesuai tugas dan fungsi PD kedalam Perjanjian Kinerja PD tahun 2024.

Pada lampiran Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 dicantumkan sasaran strategis, indikator kinerja utama, indikator kinerja lain yang relevan, target kinerja, program-program utama serta anggaran yang disediakan untuk mewujudkan sasaran.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
1.	Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 835.750.635.000
		2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	25%
		3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak Daerah yang Seharusnya Dipungut	80%
		4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	94%
		5. Jumlah Penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Terbaik Se Wilayah BI Jember (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang)	1 Penghargaan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2024
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A

Sumber data : Dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember tahun 2024

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 32.235.382.209,00	APBD
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 160.620.000,00	APBD
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 8.328.250.420,00	APBD
Jumlah	Rp. 38.718.698.409,00	

D. ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN TAHUN 2024

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember terlampir, dapat diketahui proporsi pengalokasian belanja pada program pendukung pencapaian sasaran sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis I : Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 7.385.858.586,00. Anggaran tersebut mencakup 19,08% dari total belanja langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

2. Sasaran Strategis II : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Sasaran ini didukung oleh Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.410.646.000,00. Anggaran tersebut mencakup 3,64% dari total belanja langsung Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2024

Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan Badan Pendapatan Daerah dalam merealisasikan target-target yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran capaian indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah menggunakan ketentuan sebagai berikut :

1. Predikat nilai realisasi kinerja dikelompokkan dalam skala nilai dengan pendekatan penilaian capaian kinerja dengan kriteria sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri RI nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA	KODE
1.	≥ 90	Sangat Tinggi	
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	
3.	$66 \leq 75$	Sedang	
4.	$51 \leq 65$	Rendah	
5.	≤ 50	Sangat Rendah	

Sumber : Permendagri nomor 86 tahun 2017

2. Cara menghitung prosentase capaian indikator kinerja adalah :
 - a. Bilamana indikator sasaran mempunyai makna progress positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerja menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

- b. Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna *progress negative*, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

B. CAPAIAN KINERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

Badan Pendapatan Daerah telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024 yang telah disepakati. Penilaian ini dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dalam rangka pengumpulan data kinerja yang hasilnya akan memberikan gambaran keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran.

Pengukuran target kinerja yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Serta membandingkan antara realisasi pada tahun 2024 dengan target pada akhir periode Renstra untuk mengetahui kemajuan yang telah dicapai.

Tabel 3.2
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
1.	Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 835.750.635.000	Rp. 765.603.969.372,32	91,61%	Rp. 985.308.692.000	77,70%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target 2024	Realisasi 2024	Tingkat Capaian Kinerja (% realisasi)	Target Akhir Renstra (2026)	Tingkat capaian terhadap target akhir renstra
1	2	3	4	5	6 (5/4*100%)	7	8 (5/7*100%)
		Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	25%	18,75%	75,00%	30%	62,50%
		Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak Daerah yang Seharusnya Dipungut	80%	84,70%	105,87%	90%	117,64%
		Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	94%	87,38	92,95%	98%	94,85%
		Jumlah Penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Terbaik Se Wilayah BI Jember (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang)	1 Penghargaan	-	-	-	(tidak ada target penghargaan dalam Renstra)
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A	A	100%	A	100%

Sumber Data Realisasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Berdasarkan data dalam tabel, capaian enam indikator sasaran Badan Pendapatan Daerah pada tahun 2024 menunjukkan rata-rata 93,49%, yang dikategorikan sebagai Tinggi. Jika dibandingkan dengan target akhir periode Renstra, yang ditetapkan sebesar 100% untuk setiap indikator, masih terdapat selisih capaian sebesar 6,51% dari target yang diharapkan. Meskipun demikian, hasil ini tetap mencerminkan kinerja yang positif serta perkembangan signifikan menuju pencapaian target akhir Renstra. Dengan capaian tersebut, Badan

Pendapatan Daerah secara umum telah melaksanakan perannya dalam pengelolaan pendapatan daerah secara optimal, sejalan dengan tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021-2026.

Untuk memahami tren realisasi sasaran organisasi, dilakukan evaluasi kinerja dengan membandingkan capaian tahun 2024 dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola perkembangan, mengukur efektivitas strategi yang telah diterapkan, serta menentukan langkah perbaikan guna meningkatkan pencapaian target di masa mendatang.

Tabel 3.3
Perbandingan Capaian kinerja Sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi			
		2021	2022	2023	2024
Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	92,02%	99,61%	104,61%	91,61%
	2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	96,74%	89,10%	106,17%	75,00%
	3. Persentase Pendapatan Pajak yang Dipungut terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut	100,11%	172,40%	106,67%	105,87%
	4. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	105,34%	110,81%	99,24%	92,95%
	5. Jumlah Penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Terbaik se BI Jember (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang)	-	-	-	-
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	100%	100%	100%	100%

Sumber Data Realisasi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Perbandingan capaian kinerja sasaran tahun 2024 dengan tahun sebelumnya sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan data tabel 3.3, capaian indikator-indikator yang terkait dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan fluktuasi selama periode 2021 hingga 2024.

1. Jumlah Realisasi Penerimaan PAD

- 2021 : 92,02%
- 2022 : 99,61% (meningkat dari tahun sebelumnya)
- 2023 : 104,61% (mencapai capaian tertinggi dalam empat tahun terakhir)
- 2024 : 91,61% (mengalami penurunan dibandingkan tahun 2023)

Meskipun capaian tahun 2024 sedikit lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya, capaian 91,61% tetap menunjukkan tingkat pencapaian yang tinggi. Hal ini menandakan bahwa sistem pengelolaan PAD telah berjalan dengan baik dan tetap produktif dalam kondisi yang berbeda setiap tahunnya.

2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah

- 2021 : 96,74%
- 2022 : 89,10% (mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya)
- 2023 : 106,17% (menunjukkan peningkatan kontribusi yang signifikan)
- 2024 : 75,00% (mengalami penurunan kontribusi dibandingkan tahun sebelumnya, akan tetapi tetap memberikan kontribusi yang substansial terhadap pendapatan daerah)

Capaian tahun 2024 tetap menunjukkan kontribusi PAD yang cukup besar terhadap total pendapatan daerah. Capaian ini mencerminkan bahwa pendapatan asli daerah tetap menjadi salah satu sumber utama pembiayaan daerah.

3. Persentase Pendapatan Pajak yang Dipungut terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut

- 2021 : 100,11%
- 2022 : 172,40%
- 2023 : 106,67%
- 2024 : 105,87%

Capaian dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 adalah di atas 100%, hal ini menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak tetap berjalan secara optimal.

4. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target

- 2024 : 105,34%
- 2022: 110,81%
- 2023 : 99,24%
- 2024 : 92,95%

Capaian pada tahun 2024 belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan karena adanya beberapa permasalahan dalam pemungutan pajak daerah, salah satunya adalah kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

5. Jumlah Penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah se BI Jember

- 2021 – 2024 : -

Belum terdapat capaian terhadap indikator sebagaimana tersebut diatas.

Kesimpulan Sasaran Strategis 1 :

Capaian kinerja penerimaan PAD menunjukkan tren yang dinamis dan adaptif terhadap berbagai perubahan kondisi di daerah. Badan Pendapatan Daerah telah menunjukkan resiliensi / kemampuan untuk bertahan dan beradaptasi terhadap tantangan dan perubahan dalam mengoptimalkan penerimaan pajak dan PAD, serta mempertahankan efektivitas pemungutan yang stabil selama periode 2021-2024.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Berdasarkan tabel 3.3, indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah menunjukkan capaian yang sangat positif dan stabil selama periode 2021 hingga 2024 dengan capaian selama periode tersebut sebesar 100% setiap tahun.

Indikator penilaian adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah. Dari hasil penilaian tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah dapat dikatakan telah sesuai

dengan harapan masyarakat, baik dari aspek kemudahan, transparansi, maupun efektivitas layanan.

Tabel 3.4
(Perbandingan Realisasi Kinerja Badan Pendapatan Daerah dengan Realisasi Nasional/ Regional Jawa Timur/ Realisasi Kabupaten)

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Th. 2024	Realisasi Nasional/ Provinsi/ Kabupaten	Ket. (+/-)
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A / 94,48	62,50 (nilai SAKIP Kab. Jember)	
2.	Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 765.603.969.372 ,32	-	-
		2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	18,75%	-	-
		3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak Daerah yang Seharusnya Dipungut	84,70%	-	-
		4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	87,38	-	-
		5. Jumlah Penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Terbaik Se Wilayah BI Jember (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang)	-	-	-

Sumber Data : Data Kinerja Bapenda th.2024; SUKMA-e Bapenda; Laporan Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Kabupaten Jember Tahun 2024

Berdasarkan 6 (enam) indikator kinerja Badan Pendapatan Daerah tahun 2024, 5 (lima) di antaranya tidak dapat dibandingkan dengan realisasi di tingkat nasional, provinsi, atau kabupaten lain karena tidak tersedianya data pembanding untuk indikator yang sama. Namun, 1 (satu) indikator, yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dapat diperbandingkan dengan nilai IKM Kabupaten Jember pada tahun yang sama. Realisasi IKM Bapenda tahun 2024 tercatat 31,98 poin lebih tinggi dibandingkan dengan IKM Kabupaten Jember, yang menunjukkan bahwa pelayanan di Badan Pendapatan Daerah telah berjalan secara optimal. Capaian ini mencerminkan efektivitas kebijakan dan upaya peningkatan kualitas pelayanan yang dilakukan oleh Bapenda, serta kontribusinya dalam mendukung kualitas pelayanan publik di Kabupaten Jember secara keseluruhan. Meskipun tidak semua indikator dapat dibandingkan secara langsung dengan daerah lain, hasil ini tetap menjadi tolok ukur penting dalam menilai kinerja dan perbaikan layanan pajak daerah di masa mendatang.

C. ANALISIS PROGRAM KEGIATAN YANG MENDUKUNG SASARAN

Tabel 3.5
Program Pendukung Sasaran

Sasaran	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Pendukung Sasaran	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Serapan Anggaran
Sasaran 1 :	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	128.000.000	127.392.500	99,53%
	2. Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	99.937.500	95.840.000	95,90%
	3. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	505.002.400	501.330.000	99,27%

	4. Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	550.000.000	294.544.050	53,55%
	5. Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	265.477.500	87.246.000	32,86%
	6. Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	294.518.020	277.940.000	94,37%
	7. Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	327.520.000	177.550.000	54,21%
	8. Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	777.525.000	631.553.150	81,23%
	9. Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	1.869.600.000	1.821.438.090	97,42%
	10. Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	64.000.000	61.000.000	96,25%
	11. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	400.640.000	194.755.600	48,61%
Total		5.282.220.420	4.270.589.390	80,85%
Sasaran 2 :	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah			
	• Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.046.030.000	700.938.800	23,01%
Total		3.046.030.000	700.938.800	23,01%

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja **sasaran Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah** adalah sebagai berikut :

Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) **Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	128.000.000	127.392.500
Output	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	laporan	10	10



Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah dilaksanakan untuk memastikan pemungutan retribusi daerah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup pendampingan, evaluasi, serta pengawasan terhadap instansi atau unit yang bertanggung jawab atas pemungutan retribusi. Tujuan utamanya adalah meningkatkan efektivitas, transparansi, serta kepatuhan dalam pengelolaan retribusi guna mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

2) Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	99.937.500	95.840.000
Output	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	dokumen	10	10



Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Jember melaksanakan Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah untuk memastikan bahwa laporan pajak yang disampaikan oleh wajib pajak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

Kegiatan ini dilakukan dengan beberapa langkah penting. Pertama, verifikasi lapangan, yaitu petugas Bapenda mengunjungi langsung usaha seperti hotel dan restoran untuk mencocokkan data yang dilaporkan dengan situasi di lapangan. Kedua, pengecekan status wajib pajak, di mana Bapenda memastikan apakah usaha tersebut masih aktif, sudah tutup, atau mengalami perubahan kepemilikan. Ketiga, sosialisasi dan edukasi, yaitu memberikan pemahaman kepada wajib pajak tentang pentingnya melaporkan dan membayar pajak tepat waktu.

3) **Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	505.002.400	501.330.000
Output	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	unit	20	20



Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah merupakan upaya yang bertujuan untuk menyediakan fasilitas yang mendukung pengelolaan pajak daerah secara efektif dan efisien. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi pengadaan peralatan teknologi informasi, peningkatan sistem administrasi perpajakan, serta penyediaan fasilitas pendukung lainnya. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dan mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah (keterangan foto : Pengadaan Printronix, media cetak SPPT PBB)

4) **Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	550.000.000	294.544.050
Output	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	laporan	5	5



Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan data pajak daerah dikelola dengan baik, akurat, dan selalu diperbarui. Kegiatan ini mencakup proses pengolahan data pajak yang masuk, pemeliharaan basis data agar tetap valid dan aman, serta penyusunan laporan terkait pajak daerah sebagai bahan evaluasi dan pengambilan kebijakan

5) **Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	265.477.500	87.246.000
Output	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	obyek pajak	305.977	305.977



Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah kegiatan yang dilakukan untuk menilai dan menentukan nilai objek pajak yang menjadi dasar perhitungan kewajiban pajak. Penilaian ini bertujuan agar pajak yang dikenakan sesuai dengan kondisi riil objek pajak, baik untuk tanah maupun bangunan, sehingga menciptakan keadilan dalam pemungutan pajak daerah

6) **Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	294.518.020	277.940.000
Output	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah	dokumen	5	5



Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah dilaksanakan dengan tujuan menentukan subjek pajak yang memiliki kewajiban membayar pajak daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup verifikasi data wajib pajak, pengolahan informasi pajak, serta penerbitan dokumen penetapan pajak, yang menjadi dasar dalam proses pemungutan pajak daerah. Salah satu bentuk implementasi dari kegiatan ini adalah penerbitan dan pencetakan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

7) **Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	327.520.000	177.550.000
Output	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	dokumen	5	5

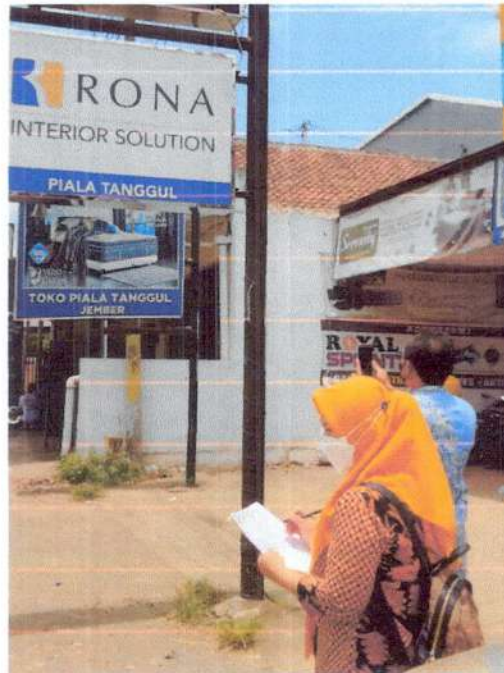


Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah bertujuan untuk meningkatkan efektivitas sistem perpajakan daerah melalui kajian dan evaluasi. Kegiatan ini mencakup analisis terhadap potensi pajak daerah, perkembangan realisasi pendapatan pajak, serta hambatan dalam pemungutannya, sehingga dapat ditemukan strategi optimal untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Selain itu, hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan perpajakan daerah, termasuk perumusan peraturan dan penyesuaian tarif pajak agar lebih sesuai dengan kondisi ekonomi dan kebutuhan pembangunan daerah

8) Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	777.525.000	631.553.150
Output	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	laporan	10	10



Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah adalah proses yang pertama kali dilaksanakan dalam pengelolaan pajak daerah yang bertujuan untuk memastikan semua objek pajak terdata dengan akurat. Kegiatan ini mencakup identifikasi, verifikasi, dan pencatatan objek pajak, seperti tanah, bangunan, usaha, dan objek pajak lainnya yang menjadi sumber penerimaan daerah

9) Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	1.869.600.000	1.821.438.090
Output	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	dokumen	10	10



Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah bertujuan agar penerimaan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kegiatan ini mencakup penerbitan surat teguran, surat paksa, hingga tindakan penagihan aktif terhadap wajib pajak yang menunggak. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mengoptimalkan penerimaan daerah

10) Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	64.000.000	61.000.000
Output	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	dokumen	4.250	4.250



Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah merupakan proses yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah untuk menangani keberatan yang diajukan oleh wajib pajak terkait penetapan pajak daerah.

11) **Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah**

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	400.640.000	194.755.600
Output	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	dokumen	20	20



Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah dilaksanakan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini mencakup pemeriksaan atas laporan pajak, pengawasan untuk mendeteksi potensi pelanggaran, serta pengendalian untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah. Salah satu aspek penting dalam kegiatan ini adalah pengendalian pajak reklame, yang bertujuan untuk memastikan seluruh reklame yang terpasang di wilayah Kabupaten Jember telah memiliki izin dan memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. Pemerintah daerah melakukan inspeksi lapangan, pencatatan reklame yang belum berizin, serta penertiban terhadap reklame yang melanggar aturan

Pelaksanaan program/ kegiatan / sub kegiatan guna mendukung tercapainya kinerja sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan pajak Daerah** adalah sebagai berikut :

Program : Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan : Pengelolaan Pendapatan Daerah

1) Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah

	Uraian Input/ Output	Satuan	Target	Realisasi
Input	Jumlah Dana	Rp	3.046.030.000	700.938.800
Output	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	layanan	20	20



Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kegiatan ini mencakup pemberian informasi, serta konsultasi terkait peraturan, prosedur pembayaran, dan penyelesaian kendala pajak daerah. Pada Badan Pendapatan Daerah, pelayanan pajak daerah dilaksanakan wajib pajak dapat memperoleh berbagai layanan, seperti pencetakan SPPT PBB, validasi data pajak, hingga pengajuan keberatan pajak

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra). Sumber daya yang dimiliki Perangkat Daerah adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2024

untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan organisasi.

Sumber daya Manusia Badan Pendapatan Daerah berjumlah 125 orang, dengan jumlah anggaran sebesar Rp 38.718.698.409 , melaksanakan 3 (tiga) program, 7 (tujuh) kegiatan dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan untuk mendukung tercapainya kinerja sasaran strategis, yang menunjukkan tingkat efisiensi penggunaan sumber daya sebagai berikut :

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran	% Capaian Kinerja	% Serapan Anggaran	Kategori Efisiensi
1. Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	100%	80,85%	Efisien
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	100%	23,01	Efisien

Sumber data : data persentase capaian kinerja pada tabel 3.2 ; data % serapan anggaran pada tabel 3.6

Capaian kinerja Sasaran 1: Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

Capaian kinerja Sasaran 2: Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah dapat dikategorikan efisien karena % capaian kinerja lebih besar daripada % serapan anggaran.

E. EVALUASI DAN ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Analisis capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dari hasil pengukuran kinerja, dilakukan evaluasi dan analisis faktor penyebab (keberhasilan / kegagalan) capaian kinerja sasaran sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Predikat Capaian Kinerja pada tahun 2024

Sasaran/ Indikator Sasaran	% Capaian	Predikat Kinerja				
		Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah
Sasaran 1 Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah						
Indikator 1.1 Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	91,61%	√				
Indikator 1.2 Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	75,00%		√			
Indikator 1.3 Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut	105,87%	√				
Indikator 1.4 Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	92,95%	√				
Indikator 1.5 Jumlah Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Terbaik se BI Jember (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang)	0,00%					√
Rata rata capaian	73,09%		√			
Sasaran 2 Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah						
Indikator 1.1 Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	100%	√				
Rata rata capaian	100%	√				

Sumber data : tabel 3.2 – 3.4 LKIP tahun 2024

Sasaran Strategis 1 : Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata-rata 73,09 %.

- Penyebab keberhasilan antara lain adalah :

- a. **Optimalisasi Pemungutan Pajak dan Retribusi**
Peningkatan efektivitas pemungutan pajak daerah melalui sistem digital dan inovasi pelayanan serta pemanfaatan teknologi dalam monitoring dan evaluasi penerimaan PAD
 - b. **Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak**
Pelaksanaan sosialisasi yang intensif mengenai kewajiban pajak dan manfaatnya untuk pembangunan daerah
 - c. **Efektivitas Pengawasan dan Evaluasi Berkala**
Pelaksanaan pengawasan untuk memastikan potensi PAD dapat terealisasi secara optimal serta adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan opd penghasil lainnya
 - d. **Dukungan kebijakan dan regulasi**
Kebijakan daerah yang jelas dalam mendukung peningkatan PAD dan penyederhanaan prosedur perizinan dan administrasi pajak daerah
- **Solusi terhadap kendala kedepan adalah :**
Meskipun capaian saat ini sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan, terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi agar kinerja terkait pengelolaan PAD dapat terus dipertahankan :
 - a. **Potensi Penurunan Kepatuhan Wajib Pajak**
Solusi : Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pajak kepada masyarakat
 - b. **Kendala Teknis dalam Digitalisasi Sistem Pemungutan Pajak**
Solusi : Meningkatkan infrastruktur teknologi dan melakukan pelatihan bagi petugas terkait sistem digital berjalan lebih efektif.
 - **Rencana perbaikan kedepan**
Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian PAD, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
 - a. **Peningkatan Digitalisasi dan Integrasi Data**
Optimalisasi pengembangan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis real time untuk meningkatkan transparansi dan efektivitas pemungutan
 - b. **Optimalisasi Pengawasan dan Evaluasi Berkala**
Meningkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal dalam pemungutan PAD untuk mencegah kebocoran penerimaan daerah

- c. Peningkatan Kapasitas SDM
Mengadakan pelatihan dan sertifikasi bagi pegawai yang terlibat dalam pengelolaan PAD untuk peningkatan kompetensinya.
- d. Penyempurnaan Regulasi dan Kebijakan
Penyusunan regulasi yang lebih fleksibel dan adaptif terkait pengelolaan pajak daerah
- e. Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-sumber Penerimaan PAD
- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain adalah :
 - a. Sosialisasi pajak secara interaktif dengan menggunakan media sosial dan platform digital untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak daerah
 - b. Bekerjasama dengan universitas dalam pelaksanaan kajian strategis dan penelitian untuk menggali potensi PAD yang belum maksimal

Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

Hasil evaluasi kinerja atas rekapitulasi capaian kinerja pada tabel 3.7 menunjukkan sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah mencapai predikat tinggi yaitu mempunyai nilai capaian rata – rata 100,00 %

- Penyebab keberhasilan antara lain adalah :
 - a. Peningkatan Sistem Layanan Digital
Implementasi layanan pajak berbasis digital yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dan mendapatkan informasi terkait pajak daerah dan adanya inovasi seperti e-BPHTB serta sistem pembayaran online yang dapat mempercepat proses administrasi pajak.
 - b. Sumber Daya Manusia yang Profesional
Peningkatan kompetensi petugas pelayanan pajak melalui pelatihan
 - c. Sosialisasi dan Edukasi Pajak
 - d. Dukungan kebijakan dan regulasi
Kebijakan daerah yang jelas dalam mendukung peningkatan PAD dan penyederhanaan prosedur perizinan dan administrasi pajak daerah
- Solusi terhadap kendala kedepan adalah :
Meskipun capaian saat ini sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan,

terdapat beberapa tantangan yang perlu diantisipasi agar kinerja terkait pengelolaan PAD dapat terus dipertahankan :

- a. Adanya Kendala Teknis dalam Sistem Digital

Solusi : Penguatan infrastruktur Teknologi dan informasi

- b. Fluktuasi Tingkat Kepuasan Masyarakat

Solusi : Melakukan survei berkala untuk memahami kebutuhan masyarakat serta menyesuaikan layanan agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat.

- Rencana perbaikan kedepan

Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian PAD, langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Peningkatan Digitalisasi Layanan

- b. Peningkatan Kapasitas SDM

- c. Penyediaan Layanan Pajak yang Lebih Fleksibel

Meningkatkan layanan pajak berbasis mobile agar lebih mudah diakses oleh masyarakat

- d. Evaluasi dan Survei Kepuasan Masyarakat secara Berkala

Melakukan evaluasi berkala melalui survei digital dan wawancara langsung untuk memastikan layanan tetap sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

- Inovasi dan / atau program kolaborasi dengan stakeholder antara lain adalah :

- Kolaborasi dengan akademisi dan lembaga penelitian untuk meningkatkan efektivitas layanan pajak berdasarkan kajian akademik

F. REALISASI ANGGARAN

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah pada tahun anggaran 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 38.718.698.409,00 yang bersumber dari APBD Kabupaten Jember.

Secara ringkas realisasi anggaran Belanja Operasional dan Belanja Modal sebagai berikut :

1. Belanja Operasional sebesar Rp. 32.235.382.209,00 terealisasi sebesar Rp. 25.241.546.501 (78,30%)

2. Belanja Modal sebesar Rp. 6.483.316.200,00 terealisasi sebesar Rp. 1.637.204.050 (25,25%)

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
1.	Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	30.229.827.989	21.783.121.361	72,06%
1.1.	Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	175.941.300	156.809.000	89,13%
	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	175.941.300	156.809.000	89,13%
1.2.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah	21.781.407.889	17.379.077.826	79,79%
	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	19.673.565.239	15.592.487.466	79,26%
	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2.107.842.450	1.786.590.360	84,76%
1.3.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat daerah	3.778.548.200	3.254.879.689	86,14%
	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	15.670.100	10.547.000	67,31%
	Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.128.316.200	937.660.000	83,10%
	Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.368.618.400	1.161.669.750	84,88%
	Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	609.171.500	507.125.000	83,25%
	Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	656.772.000	637.877.939	97,12%
1.4.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan / Daerah	506.800.000	416.206.596	82,12%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	10.000.000	7.000.000	70,00%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	496.800.000	409.206.596	82,37%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
1.5.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.987.130.800	576.148.250	14,45%
	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	105.291.600	59.155.750	56,18%
	Sub Kegiatan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	931.139.200	380.314.500	40,84%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	172.000.000	122.300.000	71,10%
	Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	2.778.700.000	14.378.000	0,52%
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	B	123.501.000	76,89%
2.1	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	160.620.000	123.501.000	76,89%
	Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	160.620.000	123.501.000	76,89%
3.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.328.250.420	4.972.128.190	59,70%
3.1	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	8.328.250.420	4.971.528.190	59,69%
	Sub Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	327.520.000	177.550.000	54,21%
	Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	505.002.400	501.330.000	99,27%
	Sub Kegiatan Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	777.525.000	631.553.150	81,23%
	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	550.000.000	294.544.050	53,55%

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp,-)	Realisasi (Rp,-)	% Realisasi
	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Peroleh Hak atas Tanah dan Bangunan	265.477.500	87.246.000	32,86%
	Sub Kegiatan Penetapan Wajib Pajak Daerah	294.518.020	277.940.000	94,37%
	Sub Kegiatan Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	3.046.030.000	700.938.800	23,01%
	Sub Kegiatan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	99.937.500	95.840.000	95,90%
	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	1.869.600.000	1.821.438.090	97,42%
	Sub Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	64.000.000	61.000.000	96,25%
	Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah	400.640.000	194.755.900	48,61%
	Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	128.000.000	127.392.500	99,53%
	JUMLAH	38.718.698.409	26.878.750.551	69,42%

Sumber Data : Laporan Realisasi Anggaran Badan Pendapatan Daerah Tahun 2024

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah ini memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan Badan Pendapatan Daerah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember secara umum telah menunjukkan pencapaian yang signifikan terhadap sasaran strategisnya. Dari 6 (enam) indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, sebanyak 5 (lima) indikator mencapai target dengan kategori Tinggi, sementara 1 (satu) indikator tidak mencapai target dengan kategori Sangat Rendah.

Indikator yang belum tercapai adalah penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (I-ETPD) Terbaik se-BI Jember (meliputi Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, dan Lumajang). Secara umum, penilaian I-ETPD mencakup implementasi transaksi non-tunai dalam belanja dan pendapatan daerah, kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kesiapan infrastruktur dan sistem keuangan digital.

Pada tahun 2024, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember telah mengambil berbagai langkah dalam implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), antara lain :

1. Mengintegrasikan transaksi belanja dan pendapatan daerah dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) Republik Indonesia. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi serta integrasi antara perencanaan, keuangan, dan pelaporan data pemerintah daerah.
2. Melaksanakan rapat evaluasi dan koordinasi terkait implementasi ETPD untuk mengidentifikasi kendala dan menyusun strategi peningkatan efektivitas sistem.

3. Mengikuti kegiatan capacity building yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia sebagai upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan sistem pembayaran digital di daerah.

Namun, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan target penghargaan I-ETPD belum tercapai, di antaranya :

1. Masih adanya wilayah blank spot, terutama di beberapa desa dan kecamatan terpencil, yang menyebabkan keterbatasan akses internet dan infrastruktur digital. Hal ini menghambat implementasi transaksi non-tunai secara menyeluruh dalam sistem pembayaran pajak dan retribusi daerah.
2. Tingkat pemahaman wajib pajak terkait I-ETPD yang masih perlu ditingkatkan, khususnya dalam penggunaan layanan pembayaran digital. Sebagian masyarakat masih terbiasa dengan metode pembayaran konvensional dan belum sepenuhnya beralih ke sistem transaksi elektronik.

Sebagai upaya tindak lanjut untuk meningkatkan penerapan elektronifikasi transaksi di Kabupaten Jember, langkah-langkah yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi layanan Mobile POS yang terhubung dengan perbankan di tingkat desa/kelurahan, sehingga transaksi pajak dan retribusi daerah tetap dapat dilakukan secara digital meskipun di wilayah yang memiliki keterbatasan jaringan internet.
2. Modifikasi sistem billing pembayaran PBB-P2 dengan integrasi QRIS, sehingga wajib pajak dapat melakukan pembayaran dengan lebih mudah melalui berbagai platform pembayaran digital yang tersedia.

Dari 6 (enam) indikator yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, selain terdapat 1 (satu) indikator yang tidak berhasil mencapai target, terdapat 5 (lima) indikator yang berhasil mencapai target yang telah ditentukan, yaitu :

1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) : **91,61%**
2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah : 75,00%
3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut : 105,87%
4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target : 92,95%
5. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah : 100%

Keberhasilan pencapaian target pada indikator-indikator tersebut didukung oleh beberapa faktor kunci berikut:

1. Optimalisasi Sistem dan Digitalisasi Pajak Daerah

Penerapan QRIS dan sistem pembayaran elektronik memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya, meningkatkan efisiensi pemungutan pajak, serta mengurangi risiko kebocoran pendapatan daerah.

2. Peningkatan Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak

Sosialisasi yang intensif serta kemudahan akses informasi melalui berbagai media, termasuk media sosial dan layanan konsultasi pajak, mendorong peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3. Strategi Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak

Pelaksanaan pengawasan dan pendataan ulang terhadap objek pajak, memastikan bahwa potensi pajak daerah dapat dimanfaatkan secara optimal. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak yang sudah terdaftar, sedangkan ekstensifikasi dilakukan dengan menambah basis wajib pajak baru.

4. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 100% mencerminkan perbaikan dalam sistem layanan pajak daerah, termasuk percepatan proses administrasi, transparansi informasi, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

5. Dukungan Kebijakan dan Regulasi yang Kuat

Penyusunan regulasi yang mendukung elektronifikasi transaksi dan peningkatan kepatuhan pajak telah memberikan dampak positif terhadap realisasi pendapatan daerah.

Rekomendasi rencana aksi yang lebih efektif untuk meningkatkan capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah ke depan :

1. Penguatan Infrastruktur Digitalisasi Pajak
Meningkatkan cakupan dan kualitas sistem pembayaran elektronik, termasuk perluasan penggunaan QRIS untuk seluruh jenis pajak dan retribusi
2. Optimalisasi Sosialisasi dan Edukasi Wajib Pajak
Peningkatan sosialisasi dan edukasi perpajakan melalui berbagai media serta memberikan layanan konsultasi pajak untuk membantu wajib pajak, terutama yang masih kurang memahami tentang sistem digitalisasi pajak
3. Peningkatan Pengawasan dan Kepatuhan Pajak
Mengembangkan sistem pemantauan berbasis data untuk mendeteksi wajib pajak yang belum terdaftar atau belum optimal dalam pembayaran pajak, serta meningkatkan pengawasan dan pemeriksaan lapangan untuk memastikan kepatuhan wajib pajak.
4. Penguatan Kerjasama dengan Pihak Terkait
Meningkatkan kerja sama dengan perbankan dan penyedia layanan keuangan digital untuk memperluas titik pembayaran yang lebih mudah diakses masyarakat
5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Terhadap Wajib Pajak
Secara berkala melakukan survei kepuasan masyarakat dan menindaklanjuti masukan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan pajak daerah
6. Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah

Demikian Laporan Kinerja Badan Pendapatan Daerah yang menggambarkan capaian kinerja setiap tujuan dan sasaran pada tahun 2024 sebagai bentuk pertanggungjawaban, dasar evaluasi serta acuan dalam penyusunan rencana kegiatan tahun 2025.

LAMPIRAN

**MATRIKS TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021-2026**

TUJUAN		SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
SEBELUM PERUBAHAN											
Meningkatkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan PAD Terhadap Pendapatan Daerah yang Dikelola Secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	1. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 637.927.673.044,00					Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Pajak Daerah, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Sarana Pemungutan Retribusi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
			2. Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	21%							
			3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut Terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut	50%							
			4. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	90%							
		2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A						Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah
SETELAH PERUBAHAN											
		1. Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)		Rp. 775.826.982.000,00	Rp. 835.750.635.000,00	Rp. 904.935.266.000,00	Rp. 985.308.692.000,00	Optimalisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1. Pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan Pajak Daerah, Monitoring dan Evaluasi Penggunaan Sarana Pemungutan Retribusi Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
									2. Pelaksanaan Penetapan dan Verifikasi Pajak Daerah		

TUJUAN		SASARAN		TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN					STRATEGI MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN		
Uraian	Indikator	Uraian	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Strategi	Kebijakan	Program
			Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah		23%	25%	27%	30%		3. Pelaksanaan Koordinasi, Perencanaan, Evaluasi, Rekonsiliasi serta Pelaporan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah 4. Pelaksanaan Pendataan, Pengembalian dan Penagihan Pajak Daerah	
			2. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut Terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut		75%	80%	85%	90%			
			3. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target		90%	94%	96%	98%			
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah		A	A	A	A	Peningkatan Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah	Pelaksanaan Pelayanan Pajak Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

(Tabel T-C.27)

**Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan (Program, Kegiatan berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi)
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SEBELUM																			
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah				Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel															
	1. Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah			1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	716.823.875.600	724.048.253.132													
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	77,67%	100%	12.145.430.700												
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	77,67%	100%	12.145.430.700												
			1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	1. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD	4 kegiatan	4 kegiatan	26.200.000											Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				2. Jumlah pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga	6 kegiatan	6 kegiatan													
				3. Jumlah laporan hasil pelaksanaan monitoring dan evaluasi penggunaan benda berharga	6 laporan	6 laporan													
				2. Rasio Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	-	21%													
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	77,67%	100%	12.145.430.700												
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	77,67%	100%	12.145.430.700												
			1. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	1. Jumlah Obyek BPHTB yang diverifikasi	14.421 op	14.709 op	215.040.000											Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
				2. Jumlah obyek Pajak Hotel, Restoran, Hiburan dan Parkir yang diteliti dan diverifikasi	9.853 op	10.050 op													
				3. Jumlah obyek pajak daerah lainnya yang diteliti dan diverifikasi	8.059 op	8.220 op													

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				4. Jumlah laporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya	12 laporan	12 laporan													
				3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	-	50%													
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	77,67%	100%	12.145.430.700												
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	77,67%	100%	12.145.430.700												
			1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	1. Jumlah pengadaan sarana dan prasarana sistem informasi pajak daerah	69 unit	60 unit	1.332.473.500											Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
				2. Jumlah pengadaan software aplikasi sistem informasi pajak daerah	5 unit	5 unit													
			2. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	1 laporan	1 laporan	573.736.800											Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB	Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			3. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek PBBP2 hasil pelaksanaan pemetaan dan survey obyek dan subyek pajak	299.978 op	305.978 op	2.929.434.000											Bidsang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
			4. Penetapan Wajib Pajak Daerah	1. Jumlah SPPT yang diterbitkan	1.053.215 SPPT	1.074.279 SPPT	271.693.500											Bidsang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
				2. Jumlah SKPD yang diterbitkan	5.414 SKPD	5.522 SKPD													
				3. Jumlah SPTPD yang diterbitkan	9.853 SPTPD	10.050 SPTPD													
			5. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah regulasi yang disusun	-	2 regulasi	67.200.000											Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB	Kabupaten Jember
				4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	-	90%													
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	77,67%	100%	12.145.430.700												
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	77,67%	100%	12.145.430.700												
			1. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	1. Jumlah obyek PBBP2 hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	9.670 op	9.863 op	1.255.434.400											Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB	Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				2. Jumlah obyek pajak daerah lainnya hasil penataan dan pendaftaran obyek pajak daerah	6.018 op	6.138 op														
				3. Jumlah dokumen perencanaan PAD	2 dokumen	2 dokumen														
			2. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah realisasi penerimaan pajak daerah	183.641.795.462	253.573.015.000	268.960.000												Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
			3. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah SK penyelesaian permasalahan pajak daerah yang diterbitkan	3.873 SK	3.950 SK	195.840.000												Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
			4. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	1. Jumlah Kelurahan hasil pelaksanaan pengendalian operasional pemungutan PBBP2	22 kelurahan	22 kelurahan	4.577.208.000												Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
				2. Jumlah desa hasil pelaksanaan pengendalian operasional pemungutan PBBP2	96 desa	96 desa														
				3. Jumlah reklame insidentil yang diterbitkan	7.300 lembar	7.446 lembar														
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A	A														

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Pencapaian Target Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	77,67%	100%	12.145.430.700												
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD	77,67%	100%	12.145.430.700												
			1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	1. Jumlah wajib pajak yang membayar pajak	789.722 wp	805.516 wp	432.210.500												
				2. Jumlah wajib pajak/retribusi yang mendapatkan pelayanan pajak dan retribusi daerah	40.320 wp	41.126 wp													
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RUTIN																			
			1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran	100%	100%	17.078.256.944												
			1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan regulasi penunjang operasional	100%	100%	106.551.700												
			a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan regulasi penunjang operasional yang disusun	4 dokumen	4 dokumen	106.551.700												

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan dan administrasi keuangan perangkat daerah lainnya	100%	100%	14.148.243.974												
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase terbayarnya gaji dan hak keuangan ASN lainnya	100%	100%	13.014.492.880											Sekretariat	Kabupaten Jember
			b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase terpenuhinya administrasi pelaksanaan tugas ASN	100%	100%	1.133.751.094											Sekretariat	Kabupaten Jember
			3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%	1.118.665.440												
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana / prasarana penerangan kantor	100%	100%	8.490.790											Sekretariat	Kabupaten Jember
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%	154.900.460											Sekretariat	Kabupaten Jember
			c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan bahan logistik kantor	100%	100%	434.642.260											Sekretariat	Kabupaten Jember
			d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase pemenuhan barang cetakan dan penggandaan	100%	100%	358.071.930											Sekretariat	Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pelaksanaan rapat / koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	100%	162.560.000												Sekretariat	Kabupaten Jember
			4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang administrasi perkantoran	100%	100%	552.399.670													
			a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan sarana surat menyurat	100%	100%	7.600.000												Sekretariat	Kabupaten Jember
			b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan administrasi komunikasi dan listrik	100%	100%	544.799.670												Sekretariat	Kabupaten Jember
			5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pemeliharaan barang milik daerah	100%	100%	1.152.396.160													
			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan pemeliharaan kendaraan jabatan	100%	100%	50.923.120												Sekretariat	Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Persentase pemenuhan pemeliharaan kendaraan operasional	100%	100%	298.638.040											Sekretariat	Kabupaten Jember	
			c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan perawatan peralatan dan mesin	100%	100%	144.115.000											Sekretariat	Kabupaten Jember	
			d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan pemeliharaan bangunan gedung kantor	100%	100%	658.720.000											Sekretariat	Kabupaten Jember	
			2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan keuangan SKPD	100%	100%	77.076.000													
			1) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan SKPD	100%	100%	77.076.000													
			a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah dokumen keuangan pelaporan keuangan	20 dokumen	20 dokumen	77.076.000											Sekretariat	Kabupaten Jember	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
SESUDAH																			
Meningkatnya Penerimaan Pajak Daerah Sebagai Bagian Dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah				Persentase Realisasi Pajak Daerah yang dikelola secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel															
	1. Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah			1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah				759.496.297.932		818.879.236.770		884.232.634.498		960.908.955.209		960.908.955.209			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Daerah				100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD				100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah				80 laporan	26.200.000	80 laporan	26.200.000	80 laporan	26.200.000	80 laporan	26.200.000	80 laporan	26.200.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
				2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah				23%		25%		27%		30%		30%			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Daerah				100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD				100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			1. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi				14.752 dokumen	230.400.000	15.489 dokumen	245.760.000	16.263 dokumen	261.120.000	17.076 dokumen	276.480.000	17.076 dokumen	276.480.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
			3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut					75%		80%		85%		90%		95%			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Daerah				100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD				100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			1. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah				10 unit	483.159.500	10 unit	439.159.500	10 unit	439.159.500	10 unit	439.159.500	10 unit	439.159.500	Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
			2. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah				12 laporan	473.736.800	12 laporan	473.736.800	12 laporan	473.736.800	12 laporan	473.736.800	12 laporan	473.736.800	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB	Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			3. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya				312.097 op	3.222.377.400	318.339 op	3.544.615.140	324.706 op	3.899.076.654	331.200 op	4.288.984.319	331.200 op	4.288.984.319	Bidsang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
			4. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen penetapan pajak daerah				3 dokumen	305.554.000	3 dokumen	336.474.500	3 dokumen	356.240.500	3 dokumen	385.325.000	3 dokumen	385.325.000	Bidsang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
			5. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisa pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah				2 dokumen	73.920.000	2 dokumen	81.312.000	2 dokumen	89.443.200	2 dokumen	98.387.520	2 dokumen	98.387.520	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB	Kabupaten Jember
			4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target					92%		94%		96%		98%		98%			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Daerah				100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD				100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			1. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah				2 laporan	1.380.977.840	2 laporan	1.519.075.624	2 laporan	1.670.983.186	2 laporan	1.838.081.505	2 laporan	1.838.081.505	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB	Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah				1.115 dokumen	287.200.000	1.181 dokumen	305.440.000	1.251 dokumen	323.680.000	1.326 dokumen	341.920.000	1.326 dokumen	341.920.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
			3. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah				3.932 dokumen	207.360.000	3.735 dokumen	218.880.000	3.548 dokumen	230.400.000	3.371 dokumen	241.920.000	3.371 dokumen	241.920.000	Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
			4. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah				168 dokumen	4.591.444.300	168 dokumen	4.609.407.000	168 dokumen	4.628.847.000	168 dokumen	4.649.891.000	168 dokumen	4.649.891.000	Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan Daerah	Kabupaten Jember
	2. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pajak Daerah			Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah				A		A		A		A		A			
			Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Realisasi Pajak Daerah				100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase Peningkatan Penerimaan PAD				100%	11.757.761.390	100%	12.323.035.269	100%	12.974.159.015	100%	13.692.885.037	100%	13.692.885.037		
			1. Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah				43.593 layanan	475.431.550	46.208 layanan	522.974.705	48.980 layanan	575.272.175	51.918 layanan	632.799.393	51.918 layanan	632.799.393	Bidang Perencanaan dan Pengembangan PBBP2 dan BPHTB	Kabupaten Jember
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN RUTIN																			
			1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/ Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran				100%	17.590.604.652	100%	18.118.322.792	100%	18.661.872.476	100%	19.221.728.650	100%	19.221.728.650		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			1) Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen perencanaan dan regulasi penunjang operasional				100%	109.748.251	100%	113.040.699	100%	116.431.919	100%	119.924.877	100%	119.924.877		
			a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah				13 dokumen	109.748.251	13 dokumen	113.040.699	13 dokumen	116.431.919	13 dokumen	119.924.877	13 dokumen	119.924.877	Sekretariat	Kabupaten Jember
			2) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dokumen laporan keuangan dan administrasi keuangan perangkat daerah				100%	14.572.691.293	100%	15.009.872.032	100%	15.460.168.193	100%	15.923.973.239	100%	15.923.973.239		
			a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN				1.308 org/bln	13.404.927.666	1.308 org/bln	13.807.075.496	1.308 org/bln	14.221.287.761	1.308 org/bln	14.647.926.394	1.308 org/bln	14.647.926.394	Sekretariat	Kabupaten Jember
			b. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN				6 dokumen	1.167.763.627	6 dokumen	1.202.796.536	6 dokumen	1.238.880.432	6 dokumen	1.276.046.845	6 dokumen	1.276.046.845	Sekretariat	Kabupaten Jember
			3) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah				100%	1.152.225.403	100%	1.186.792.165	100%	1.222.395.930	100%	1.259.067.808	100%	1.259.067.808		
			a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan				3 paket	8.745.514	3 paket	9.007.879	3 paket	9.278.115	3 paket	9.556.459	3 paket	9.556.459	Sekretariat	Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan				8 paket	159.547.474	8 paket	164.333.898	8 paket	169.263.915	8 paket	174.341.832	8 paket	174.341.832	Sekretariat	Kabupaten Jember
			c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan				17 paket	447.681.528	17 paket	461.111.974	17 paket	474.945.333	17 paket	489.193.693	17 paket	489.193.693	Sekretariat	Kabupaten Jember
			d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan				10 paket	368.814.088	10 paket	379.878.511	10 paket	391.274.866	10 paket	403.013.112	10 paket	403.013.112	Sekretariat	Kabupaten Jember
			e. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				5 laporan	167.436.800	5 laporan	172.459.904	5 laporan	177.633.701	5 laporan	182.962.712	5 laporan	182.962.712	Sekretariat	Kabupaten Jember
			4) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan sarana prasarana penunjang administrasi perkantoran				100%	568.971.660	100%	586.040.810	100%	603.622.034	100%	621.730.695	100%	621.730.695		
			a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat				1 laporan	7.828.000	1 laporan	8.062.840	1 laporan	8.304.725	1 laporan	8.553.867	1 laporan	8.553.867	Sekretariat	Kabupaten Jember
			b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan				3 laporan	561.143.660	3 laporan	577.977.970	3 laporan	595.317.309	3 laporan	613.176.828	3 laporan	613.176.828	Sekretariat	Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			5) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan administrasi pemeliharaan barang milik daerah				100%	1.186.968.045	100%	1.222.577.086	100%	1.259.254.399	100%	1.297.032.031	100%	1.297.032.031		
			a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya				2 unit	52.450.814	2 unit	54.024.338	2 unit	55.648.068	2 unit	57.314.420	2 unit	57.314.420	Sekretariat	Kabupaten Jember
			b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional / Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya				61 unit	307.597.181	61 unit	316.825.097	61 unit	326.329.850	61 unit	336.119.745	61 unit	336.119.745	Sekretariat	Kabupaten Jember
			c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara				63 unit	148.438.450	63 unit	152.891.604	63 unit	157.478.352	63 unit	162.202.702	63 unit	162.202.702	Sekretariat	Kabupaten Jember
			d. Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi				1 unit	678.481.600	1 unit	698.836.048	1 unit	719.801.129	1 unit	741.395.163	1 unit	174.395.163	Sekretariat	Kabupaten Jember

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi
						Tahun ke-1		Tahun ke-2		Tahun ke-3		Tahun ke-4		Tahun ke-5		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase pelaksanaan pengelolaan keuangan SKPD				100%	79.388.280	100%	81.769.928	100%	84.223.026	100%	86.749.717	100%	86.749.717		
			1) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase pemenuhan dokumen pelaporan keuangan SKPD				100%	79.388.280	100%	81.769.928	100%	84.223.026	100%	86.749.717	100%	86.749.717		
			a. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bulanan, triwulanan dan semesteran				20 laporan	79.388.280	20 laporan	81.769.928	20 laporan	84.223.026	20 laporan	86.749.717	20 laporan	86.749.717	Sekretariat	Kabupaten Jember



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 Telp. (0331) 337112 JEMBER 68121

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : HADI SASMITO, S.H, M.Si.

Jabatan : Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Jabatan : Bupati Jember

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jember, 26 Januari 2024

Pihak Kedua

BUPATI JEMBER

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.

Pihak Pertama

**PLT. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN JEMBER**

**HADI SASMITO, S.H., M.Si.
NIP. 19680407 199803 1 009**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jawa Nomor 72 Telp. 337112 JEMBER 68121

PERJANJIAN KINERJA 2024
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah untuk Mendukung Peningkatan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 835.750.635.000,00
		2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	25%
		3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak Daerah yang Seharusnya Dipungut	80%
		4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	94%
		5. Jumlah Penghargaan Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Terbaik se Wilayah BI Jember (Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo dan Lumajang)	1 penghargaan
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 32.235.382.209,00	APBD
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 160.620.000,00	APBD
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp. 8.328.250.420,00	APBD
Jumlah	Rp. 38.718.698.409,00	

Jember, 26 Januari 2024


BUPATI JEMBER

Ir. H. HENDY SISWANTO, ST, IPU, ASEAN Eng.


PIR KERALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
 BADAN PENDAPATAN DAERAH
HADI SASMITO, S.H., M.Si.
 NIP. 19680407 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Jawa Nomor 72 Telp. (0331) 337112 JEMBER 68121


RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN ANGGARAN 2024

Misi	Tujuan RPJMD	Indikator Tujuan RPJMD	Sasaran RPJMD	Indikator Sasaran RPJMD
Misi Bupati ke-2 Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Kondusif antara eksekutif, Legislatif, Masyarakat dan Komponen Pembangunan Daerah Lainnya	Tujuan ke-1 Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif Melalui Sinergi dengan Seluruh Elemen Pembangunan Daerah dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya Realisasi Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah

TUJUAN		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator	Target	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (output)	Target	Anggaran
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah	Persentase Peningkatan PAD terhadap Pendapatan Daerah yang Dikelola secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel	1. Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rp. 835.750.635.000	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tercapainya realisasi penerimaan pendapatan daerah	100%				
			2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	25%	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan PAD	100%	1. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan pengelolaan retribusi daerah	80 laporan	Rp. 83.200.000,00
			3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak Daerah yang Seharusnya Dipungut	80%				2. Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah data pelaporan pajak daerah yang telah dilakukan penelitian dan verifikasi	15.489 dokumen	Rp. 261.769.000,00
			4. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target	94%				4. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah	86 unit	Rp. 239.206.600,00
								5. Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah	12 laporan	Rp. 823.264.000,00

TUJUAN		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator	Target	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (output)	Target	Anggaran
			5. Jumlah Penghargaan Daerah Dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tertinggi dari Kementerian Dalam Negeri	1 penghargaan				6. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah obyek pajak yang disesuaikan NJOP nya	318.339 op	Rp. 533.970.000,00
								7. Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah dokumen ketetapan pajak daerah	1.117.680 dokumen	Rp. 240.734.986,00
								8. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil analisis pajak daerah serta pengembangan pajak daerah dan kebijakan pajak daerah	2 dokumen	Rp. 767.926.000,00
								9. Pendataan dan Pendaftaran Obyek Pajak Daerah	Jumlah laporan hasil pendataan dan pendaftaran obyek pajak daerah, subyek pajak dan wajib pajak daerah	1.500 laporan	Rp. 847.160.000,00
								10. Penagihan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penagihan pajak daerah	1.404 dokumen	Rp. 731.970.000,00
								11. Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil penyelesaian keberatan pajak daerah	4.139 dokumen	Rp. 103.072.000,00
								12. Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah dokumen hasil pemeriksaan serta pengendalian dan pengawasan pajak daerah	154 dokumen	Rp. 2.753.586.000,00

TUJUAN		SASARAN			PROGRAM / KEGIATAN			SUB KEGIATAN			
Uraian	Indikator Tujuan	Uraian	Indikator	Target	Program / Kegiatan	Indikator	Target	Uraian	Indikator Kegiatan (output)	Target	Anggaran
		2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	A	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tercapainya realisasi penerimaan pendapatan daerah	100%				
					Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Prosentase peningkatan penerimaan PAD	100%	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah layanan dan konsultasi pajak daerah	41.126 layanan	Rp. 1.410.646.000,00

Jember, 26 Februari 2024
 Plt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
 KABUPATEN JEMBER

HADI SASMITO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680407 199803 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Jawa Nomor 72 Jember Telp. (0331) 337112 JEMBER 68121

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

Nomor : 065/ ¹⁵³ /1.31/2024

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember dalam suatu Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama ;

- i. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tersebut dalam lampiran;
- KETIGA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk :
- (1) Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi
 - (2) Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi
- KEEMPAT** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimanfaatkan untuk:
- a. Perencanaan Strategis Organisasi Perangkat Daerah
 - b. Perencanaan Tahunan Organisasi Perangkat Daerah
 - c. Penyusunan Dokumen Perjanjian Kinerja Organisasi Perangkat Daerah
 - d. Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
 - e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah
- KEENAM** : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jember
Pada tanggal : 27 Januari 2024

**Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN JEMBER**



HADI SASMITO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680407 199803 1 009

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER

- Instansi : Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Jember
- Tugas : Badan Pendapatan Daerah merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang keuangan
- Fungsi :
- a. Perumusan dan penataan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
 - b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pendapatan daerah;
 - c. Pelaksanaan perencanaan pendapatan daerah;
 - d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendapatan daerah dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan perangkat daerah dan instansi terkait;
 - f. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD;
 - g. Penyusunan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
 - h. Pelaksanaan pemungutan Pajak Daerah;
 - i. Pelaksanaan pengembangan, pengendalian dan evaluasi pemungutan PAD;
 - j. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
 - k. Perumusan dan penetapan rencana strategis dan rencana kerja badan di bidang pendapatan daerah;
 - l. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan urusan di lingkup bidang pendapatan daerah;
 - m. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya dengan instansi terkait;
 - n. Penyusunan rencana penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
 - o. Pelaksanaan koordinasi pemungutan PAD dengan instansi terkait;

- p. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan PAD;
- q. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- r. Pelaksanaan pembukuan dan pelaporan realisasi penerimaan PAD dan pendapatan daerah lainnya;
- s. Penetapan rencana program, kegiatan dan penganggaran pada lingkup badan;
- t. Penyusunan rencana penerimaan PAD dalam lingkup badan;
- u. Pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah; dan
- v. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Mewujudkan Kemandirian Keuangan Daerah

Indikator Tujuan : Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah yang dikelola secara Efektif, Efisien, Transparan dan Akuntabel

- Sasaran :
1. Mewujudkan Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

- Indikator Tujuan :
1.
 - a. Jumlah Relisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
 - b. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
 - c. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi yang Seharusnya Dipungut
 - d. Persentase Realisasi Pajak Daerah terhadap Target
 2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN JEMBER
TAHUN 2024**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Mewujudkan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Jumlah Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Jumlah Realisasi Penerimaan PAD Tahun Berkenaan Penjelasan : Data realisasi PAD diperoleh dari data realisasi PAD Kabupaten Jember yang dilaporkan melalui aplikasi Pajak Daerah Lainnya	Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		2. Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	$\frac{\text{Jumlah Realisasi PAD}}{\text{Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah}} \times 100\%$ Penjelasan : Realisasi PAD adalah total penerimaan daerah dari pajak, retribusi, dan sumber lain dalam satu tahun anggaran. Jumlah Realisasi Pendapatan Daerah adalah total penerimaan yang berhasil dikumpulkan dari berbagai sumber pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran	Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3. Persentase Pendapatan Pajak Daerah yang Dipungut terhadap Potensi Pajak yang Seharusnya Dipungut	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah Tahun Berjalan} + \text{Tagihan Pajak}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah Realisasi Pajak Daerah adalah total penerimaan dari pajak daerah yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahun anggaran. Jumlah Target Pajak Daerah Tahun Berjalan + Tagihan Pajak Daerah Tahun Berjalan adalah total proyeksi penerimaan pajak daerah dalam satu tahun anggaran ditambah dengan kewajiban pajak yang harus dibayarkan pada tahun yang sama.</p>	1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah 2. Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah
		4. Persentase Realisasi Pajak Daerah Terhadap Target	$\frac{\text{Jumlah Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Jumlah Target Pajak Daerah}} \times 100\%$ <p>Penjelasan : Jumlah Realisasi Pajak Daerah adalah total penerimaan dari pajak daerah yang berhasil dikumpulkan dalam satu tahun anggaran. Jumlah Target Pajak Daerah adalah total penerimaan pajak yang ditetapkan sebagai sasaran dalam satu tahun anggaran.</p>	1. Bidang Perencanaan dan pengembangan Pendapatan Daerah 2. Bidang Penagihan dan Pelaporan Pendapatan Daerah 3. Bidang Bidang Penetapan dan Keberatan Pendapatan Daerah 4. Bidang Verifikasi dan Pengendalian Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN DAN PENJELASAN	BIDANG PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat atas Pelayanan Pajak Daerah	<p>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</p> <p>Penjelasan Indikator :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) merupakan data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Perhitungan nilai IKM datanya diinput dan diolah menggunakan melalui Sistem Informasi (e-SUKMA) 3. Indeks Kepuasan Masyarakat berpedoman pada PermenPANRB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Publik 4. Unsur pelayanan yang dinilai dalam IKM, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> • Kesesuaian persyaratan • Sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan • Waktu penyelesaian • Biaya / tarif. • Produk Spesifikasi, Jenis Pelayanan • Kompetensi pelaksana • Perilaku pelaksana • Penanganan pengaduan , saran dan masukan • Sarana dan prasarana 	Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	Badan Pendapatan Daerah